



## RUANG KOTA

# **RUANG KOTA**

**PROLOG :REVIANTO B. SANTOSA**

**EPILOG : PURNAWAN BASUNDORO**

**ANINA NURLAILA KURNIASARI / ARDYAN M. ERLANGGA /AZWAR ANAS  
DIAN DWI ANISA / HASTI KUSUMA DEWI / JIHAN RIZA ISLAMI  
KHAIRUL ANAM / MIFTAHUL FAWAID / MOH. HABIB ASYHAD  
NISRINA MUTHAHARI / NOR ISLAFATUN / NURDINI DIAH EKAWATI  
PRIMA SULISTYA W/ RHEA YUSTITIE / SWADESTA ARIA WASESA**

ATKINSON

## **RUANG KOTA**

Ardyan M. Erlangga, dkk.

### **Tim Editor :**

Budi Mulyono, Fadila Fikriani Armadita, Iswara Noor Raditya,  
Kalam Jauhari, Mindiptono Akbar, M. Rodhi Asy'ad

Penyelaras: Tim Kerja Buku

Desain Sampul: Cahyo Waskito P. A.

Konsep Desain Sampul: Indra Widiyanto S. M.

Penata Letak: Dwi Fajar Wijayanto, Rhea Yustitie

Pemeriksa Aksara: Dian Dwi Anisa

Foto: Azwar Anas, Dwi Fajar Wijayanto

### **Tim Kerja:**

Ardyan M. Erlangga, Azwar Anas, Khairul Anam,  
Moh. Habib, Asyhad, Prima S.W., Swadesta A. Wasesa

Cetakan Pertama, Februari 2011

Diterbitkan oleh EKSPRESI Buku

Lembaga Pers Mahasiswa EKSPRESI

Gedung Student Center Lt. 2 Karangmalang

Universitas Negeri Yogyakarta

Telp (0274) 586168 ext 250 — Fax (0274) 565500

Email: [lpm\\_ekspresi@yahoo.com](mailto:lpm_ekspresi@yahoo.com)

<http://www.ekspresionline.com>

ISBN: 978-979-99631-4-7

## DAFTAR ISI

ANNA NURLAILA KURNIASARI

Dari Penerbit : Melipat Kota dalam Kata -- 9

### PROLOG :

REVIANTO B. SANTOSO

Berkediaman di Simpang Raya:

Ruang Urban dan Dinamikanya- -17

### Sketsa Ruang

ARDYAN M. ERLANGGA

Ruangmu Belum Tentu Istana- - 25

KHAIRUL ANAM

Berebut Ruang: Ikhtisar Kota (Indonesia) -- 43

### Fenomena Kota Kontemporer

AZWAN ANAS

Mal dan Raut Wajah Kota -- 59

PRIMA SULISTYA W.

Nama Jalan di Sepanjang Jaman -- 71

ANNA NURLAILA KURNIASARI

Masa Lalu Sungai, Masa Depan Kota -- 83

MOH. HABIB ASYHAD  
Mari Melebur Bersama (Kampung) Kota -- 93  
NOR ISLAFATUN  
Geliat Makam di Ruang Kota -- 105  
NISRINA MUTHAHARI  
Imajinasi Ruang dalam *Cluster* -- 115  
JIHAN RIZA ISLAMI  
Baliho dan Politik Ruang:  
Pertarungan Antara Warga, Pemerintah, dan Kapitalis -- 127  
MIFTAHUL FAWAID  
Ruang yang Rapuh Bernama Pendidikan -- 139  
SWADESTA ARIA WASESA  
Relokasi dan Kuasa Atas Ingatan -- 149  
NURDINI DIAH EKAWATI  
Peta yang Tersisih -- 159

#### **Geliat Masyarakat Kota**

RHEA YUSTITIE  
Ruang dan Inovasi untuk Pedagang "Lima Kaki" -- 169  
DIAN DWI ANISA  
Mari Bertemu di Rel Lempuyangan -- 179  
HASTI KUSUMA DEWI  
Akhir dari Realitas Dunia:  
Ketika Aktivitas Manusia Beralih ke Ruang Maya -- 191

#### **EPILOG**

PURNAWAN BASUNDORO  
Status Sosial-Ekonomi Warga sebagai Basis Pembagian Ruang Kota-- 205

Indeks -- 221

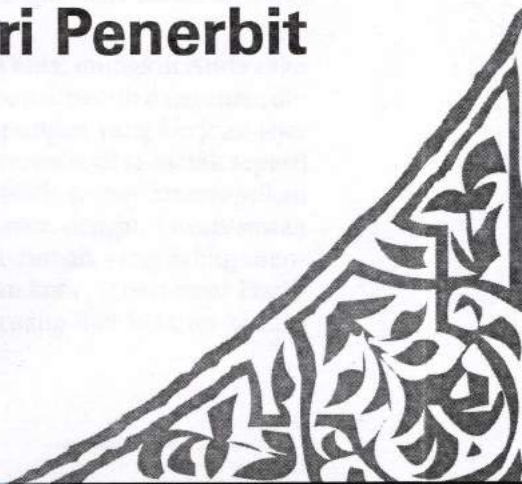
Tentang Penulis -- 235

Tentang EKSPRESI -- 239



Melipat Kota  
dalam Kata

**Dari Penerbit**



nama: Nurfailla  
Karniasari

## Melipat Kota dalam Kata

PERTAMA kali mendengar kata ruang, pasti dalam benak Anda akan hadir persepsi atau gambaran paling sederhana tentang ruang, yakni sebuah tempat tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, yang dari penggabungan dari ketiga dimensi tersebut menghasilkan suatu ruang.

Lalu, pertama kali mendengar kata kota, mungkin Anda akan membayangkan sebuah tempat yang ramai, penuh bangunan, dengan jalan-jalan yang padat, perkampungan yang berjejer-jejer dan juga mal-mal. Segala macam hal tersedia di sana, tak seperti di desa -lawan dari kata kota- yang lebih sering dipersepsikan sebagai tempat yang jauh dari keramaian, dengan sawah-sawah yang menghampar luas, serta rumah-rumah yang saling menjauhi. Lantas bagaimana jika ruang dan kota itu bertemu? Hasilnya tidak akan sesempit pengertian ruang dan kota itu sendiri bila berdiri masing-masing.



Pertemuan ruang dan kota tersebut disusul dengan hadirnya definisi-definisi, konsep serta teori yang berkembang. Zaman dahulu, kota adalah pusat pemerintahan. Seiring waktu berlalu, ia luruh dan sudi mencipta definisi-definisi lain tentang kota dengan ruang memesonakan. Kota telah menulis riwayat hidupnya sendiri, lewat masyarakat sebagai pelaku sekaligus pembentuk.

Jilidan yang Anda sibak kala ini, adalah buah pikir yang butuh tumbuh lama; 5 bulan. Sebulan melambat dari jadwal awal. Sejak berupa ide mentah sampai jalinan pikir yang coba kami selaraskan. Sekumpulan ide-ide itu telah melalui proses 'peperangan' dengan lainnya, bermula dari bank tema, presentasi tema, pengadilan tema hingga dipilihnya tema ini; Ruang Kota.

Teristimewa lebih, ia tergarap disela-sela "euforia" prabencana-pascabencana erupsi Gunung Merapi sejak Oktober 2010 silam. Sepintas kami merenung dan mewajibkan diri vakum selama beberapa waktu, dan membutuhkan upaya yang tidak sebentar guna menumbuhkan dan menempatkan kami ke rel semula. Tak ayal, prioritas kami terbelah. Kerja 'intelektual' yang sudah separuh jalan, tiba-tiba ditantang oleh kerja kemanusiaan. Susah payah, mereka berdua sanggup kami gauli.

Menyinggung wacana ruang kota, tentu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Perbincangan kota, sudah berulang kali di tulis di berbagai pengumuman. Satu lagi PR kami; jangan menunggang. Sempat mestinya pembaca yang budiman mendengar istilah 'kota mati', namun kota sendiri tak akan pernah mati hingga zaman berakhir kelak. Dan, itulah titik anjaknya. Tidak ada kematian untuk kota, wacana ruang kota apalagi. Begitu dahsyatnya istilah kota, hingga kota tetap saja menjadi patokan tempat dengan segala sesuatu yang tersedia di sana. Untuk beberapa riwayat, sering diperdengartuliskan terma *bedol desa*, namun belum sempat terjangkau oleh kami istilah *bedol kota*.

Jika Anda pecandu buku-buku EKSPRESI, mesti merasai beda besar dengan terbitan-terbitan kami yang telah lewat. Kasat mata, ukurannya lebih besar dari yang sudah-sudah. Tidak semena-mena alasan mengapa harus terjadi perubahan ukuran. Diskusi alot dengan kawan-kawan dan evaluasi sebelumnya, meminta kami perlu merevisi luaran buku EKSPRESI. Imbasnya, pembaca tidak butuh lagi sebentar-bentar memicingkan mata karena mininya ukuran buku.

Untuk isi, pembaca tidak perlu risau. Kami masih menyediakan tiga bab untuk mengulas jalinan pikir kami. Tidak melulu

nya disugahi dengan wacana-wacana tentang kota, tapi pembaca juga diajak menjelajahi tiap detail kota, seakan kita bisa sama-sama hendak membaca kota itu sendiri dengan berbagai cara yang kerap kita hiraukan.

Mula-mula, buku kami menyuguhkan konsep ruang dan pola-lalu lanskap ruang kota di Indonesia. Cukup dua dahulu. Sekadar bekal awal pembaca menjelajah bagian yang akan menjelajah. Mereka berupaya membukakan jalan supaya pembaca jangan sampai tersesat menyerap maksud-maksud tulisan selanjutnya.

Mari kita sejenak tinggalkan konsep dan lanskap ruang kota Indonesia barusan tadi. Fenomena-fenomena ruang kota Indonesia kekinian, tidak boleh diceraikan dari pembentuknya di kala lewat. Renik-renik itu misalnya; mal, sungai, kampung, makam, balibo, sampai peta kota yang hanya terpancang di pemampatan jalan atau depan pos polisi. Barangkali deretan-dereetan bangunan dan area tadi bagi sebagian kalangan sebatas rupa itu. Tapi siapa kira ternyata mereka semua membentuk dan terbentuk oleh warga kota.

Sesudah pembaca berplesir dengan renik-renik itu, serasa perlu tertuntaskan pada penyikapan warga kota terhadap ruang-nya sendiri. Pembacaan yang lebih tepat adalah memakai pengamatan langsung dengan terjun ke lapangan. Menanyai mereka satu-satu. Menggali apa yang dirasa dan diperbuat sesungguhnya. Catatan perjalanan ini sengaja di letakkan pada bab terakhir, sebagai pelengkap konsep dan wacana kota. Sehingga tak hanya merewanakan dan meneorikan ruang kota, namun di "Ruang Kota" ini ada ruang tersendiri tentang perilaku masyarakat menyikapi habitatnya, misalnya saja tentang adanya PKL modern. Hutan terkuak bagaimana masyarakat sebagai pelaku menyikapi keberadaan kota dengan segala tetek-bengeknya, dan menjadikan hal-hal tersebut menjadi bagian dari pola hidup mereka. Dan semua itu terjadi di sebuah tempat istimewa, bernama kota.

Terimakasih kami terucap mantap terhadap jajaran rektorat; Bapak Rochmad Wahab, Bapak Herminarto Sofyan, Ibu Nurfina Aznam dan Bapak Sutrisna Wibawa. Tak boleh terlupa, Bapak Budi Sulistya dan Bapak Hermanto. Mereka semua selain bertanggungjawab atas tindak-tanduk kami sebagai bagian kecil dari Universitas Negeri Yogyakarta, juga sekaligus di beberapa kesempatan menjadi pembimbing yang amat berharga. Juga selaksa hormat kepada Bu Ari Kusmiatun yang



dengan sabar menemani, membimbing, mengarahkan dan juga memberi banyak masukan yang berarti kepada kami. Ia selalu sedia meluangkan waktunya untuk kami berkeluh kesah.

Selama proses belajar kami melahirkan buku, beragam diskusi terlaksanakan dengan beberapa pemerhati wacana perkotaan. Salam hangat buat Yosi Fajar Kresno Mukti dari IVAA (*Indonesian Visual Art Archive*) dan Revianto Budi Santoso, Dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta, yang sudi melenggangkan waktunya menemani diskusi guna memahamkan akan wacana ruang kota Indonesia.

Lain daripada itu, sejenak juga haturan hormat bagi para kontributor. Revianto Budi Santoso sudi menulis prolognya untuk menjembatani awal isi buku dengan pembaca. Purnawan Basundoro memungkasinya dengan epilog yang menggugah selera baca. Terimakasih bagi dua senior intelektual kami itu.

Durhaka amat apabila kami yang masih belia ini tidak menghamburkan kasih dan hormat teruntuk; Muhidin M. Dahlan, Zen RS, Mustaqim, M. Iqbal, M. Safrinal Lubis, Sismono La Ode, M. Thobroni, Antok Priyo W, M. Faiz Ahsoul, Agung DH, Nur Iswarso, Iswarta Bima PL, Islahuddin, Ana Novianti, dan sederet nama tak tersebut yang telah membelajarkan EKSPRESI. Mungkin mereka tidak butuh terimakasih, tapi itu kewajiban bagi kami yang sudah berulang kali merecoki kehidupan mereka dengan kerja-kerja EKSPRESI, serta bantuan dan saran yang tak hendak surut.

Serta para alumni lainnya yang terus saja dirusuhi untuk membantu menjadi editor buku meskipun di tengah-tengah kesibukan masing-masing, tetap mau meluangkan waktunya; Kalam Jauhari, Budi Mulyono, Iswara N. Raditya, Fadila F. Armadhita, M. Rodhi As'ad, serta Mindiptono Akbar. Masukan dan sentuhan mereka kiranya menyelematkan buku jadi 'lebih' terbaca.

Pungkasnya, jalinan hormat dan salut mesti tersampaikan bagi kawan-kawan EKSPRESI kepengurusan 2010. Kerja samanya, yang selama ini telah berproses diawali dengan bank tema dan sudahi dengan *launching* hingga evaluasi buku ini kelak. Apa lacur, *deadline* telah melangkahi kami beberapa waktu. Tapi, inilah buahnya, meski tidak amat manis.

Selalu ada ruang dalam setiap celahnya. Buku ini juga diharapkan mampu menempati ruang tersendiri di hati para pembaca.

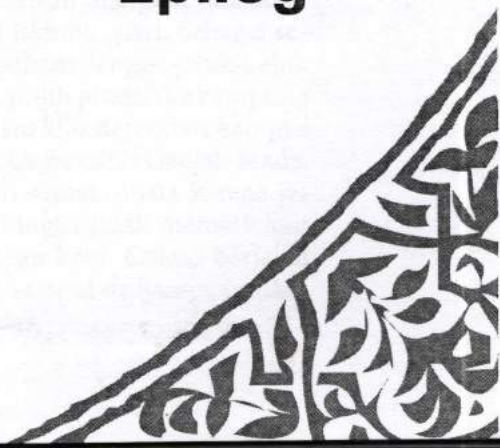
...sekalipun. Anggap saja buku ini sejumpat proses belajar kami  
di EKSPRESI. Sekiranya kalau pandangan pembaca terwakilkan  
di sini? Atau malah sungguh bertolak belakang dengan isi ke-  
pada pembaca? Maka sampaikan dengan bernas kritik itu! ●

Sistem Sosial

Ekonomi Warga

Selamat Datang Pemahaman Masyarakat

## Epilog



Purnawan  
Basundoro

## **Status Sosial- Ekonomi Warga**

**Sebagai Basis Pembagian Ruang Kota**

PADA tahun 1991, tanpa sebuah kesalahan apapun, saya bersama beberapa teman “diusir” dari kos saya di Terban, dengan alasan bahwa tempat tersebut akan direnovasi. Tempat kos yang sangat sederhana, yang hanya berdinding *gedhek*, yang sudah saya tempati selama satu tahun pun akhirnya saya tinggalkan.

Pada sore hari setelah Maghrib, dengan diangkut dua buah becak, saya pindahan ke kos baru di Blimbingsari. Sebagai seorang pendatang yang belum begitu paham dengan seluk-beluk dan kondisi Kota Yogyakarta, saya memilih pindah ke kampung Blimbingsari, yang berjarak sekitar satu kilometer dari kampus tempat saya kuliah di Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Pilihan untuk tinggal di Blimbingsari semata-mata karena jarak ke kampus tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan ongkos tambahan untuk naik angkutan kota. Cukup berjalan kaki sekitar lima belas menit sudah sampai di kampus. Maklumlah, uang saku bulanan sangat terbatas.



Beberapa saat sesudah saya tinggal di Blimbingsari, suatu sore saya duduk-duduk dengan beberapa kawan di depan kamar kos. Tempat yang digunakan untuk duduk-duduk adalah sebuah tempat duduk memanjang yang terbuat dari beton cor. Semula saya mengira bahwa yang saya duduki benar-benar dibuat untuk tempat duduk. Namun, beberapa saat kemudian saya mulai curiga karena tempat duduk tersebut salah satu ujungnya membentuk lingkungan, persis seperti makam untuk orang Cina. Kecurigaan saya pun akhirnya terjawab, ketika pada suatu kesempatan saya bertanya kepada teman-teman yang lebih dahulu tinggal di tempat tersebut. Mereka menjawab bahwa tempat yang kita jadikan area untuk duduk-duduk memang sebuah bangunan makam Cina. Saya baru sadar, bahwa kampung Blimbingsari adalah bekas makam Cina yang digusur oleh para pendatang untuk dijadikan tempat tinggal.

Beberapa tahun kemudian, setelah saya intensif mempelajari ruang-ruang kota, saya baru paham bahwa terbentuknya kampung Blimbingsari merupakan hasil dari sebuah perebutan ruang. Walaupun kawasan Blimbingsari pada awalnya adalah sebuah makam, bukan berarti perebutan ruang yang terjadi di kawasan tersebut adalah antara yang telah mati dengan yang telah hidup. Blimbingsari adalah hasil dari sebuah pertarungan antara para pewaris dari yang telah dimakamkan, dengan para pendatang yang membutuhkan tempat tinggal. Kekalahan para pewaris telah menyebabkan leluhur mereka merana di dalam makam, karena di atas mereka telah muncul kehidupan baru yang tidak layak muncul di tempat tersebut.

Realitas yang terjadi di Blimbingsari adalah contoh betapa proses perebutan ruang di kota besar sudah melembaga sedemikian keras, sehingga makam yang mestinya menjadi tempat yang tenang untuk tempat beristirahat orang-orang yang sudah pergi ke "alam sana" masih harus terganggu dengan kehadiran manusia-manusia kuburan. Bisa jadi mereka yang tengah istirahat di alam lain tidak lagi RIP dalam arti *Requiem in Pacem* atau *rest in peace* (istirahat dalam ketenangan), tetapi *rest in panic* (istirahat dalam kepanikan) karena ruang mereka tergusur oleh pendatang lain.

Blimbingsari adalah contoh perebutan ruang yang sudah mencapai taraf *excessive* (keterlaluan) karena sudah melewati batas-batas kewajaran moral secara umum. Jika dipandang melalui kacamata orang-orang yang bisa memperoleh ruang

yang wajar, baik dari segi tempat maupun dari segi kelayakan.<sup>1</sup> Blimbingsari bukanlah satu-satunya makam yang tergusur. Di Yogyakarta terdapat beberapa tempat lain dengan kasus serupa, yaitu Badran, Kompleks Masjid Kampus UGM, dan Sagan.

Blimbingsari, Badran, Kompleks Masjid Kampus UGM, dan Sagan adalah bagian dari sebuah kenyataan ketika kota-kota berkembang tidak terkendali akibat kenaikan jumlah penduduk yang terjadi secara simultan dan tidak dibarengi dengan kebijakan untuk membagi dan menata ruang secara adil oleh pemegang otoritas kota. Ketika para penghuni kota atau orang-orang yang tertarik untuk tinggal di kota dibiarkan untuk bersaing secara bebas, maka akan terjadi proses di mana ruang-ruang kota yang masih terbuka diperebutkan secara bebas pula.<sup>2</sup> Bahkan tidak jarang ruang kosong yang sudah memiliki legalitas klaim, yang mestinya bukan lagi ruang kosong karena sudah ada otoritas di tempat itu, diabaikan begitu saja oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki kekuatan untuk menduduki ruang tersebut.<sup>3</sup>

Menilik kenyataan tersebut maka sejatinya antara kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali yang berujung pada kebutuhan akan ruang, ruang kota yang terbatas, dan kekuatan (*powers*) yang dimiliki oleh kelompok maupun individu penghuni kota memiliki keterkaitan yang erat yang berujung pada klaim terhadap ruang kota. Jika klaim dilawan oleh klaim yang lain, maka sebuah proses perebutan ruang kota tengah terjadi. Proses semacam ini hampir melanda semua kota di dunia di mana

<sup>1</sup> Baik para penganut agama maupun para pengemban tradisi yang berakar dari kesukuan, makam biasanya dianggap sebagai tempat yang keramat dan harus dihormati karena di tempat tersebut berbaring makhluk sejenis yang akan menghadap Sang Pencipta. Dalam agama Islam misalnya terdapat petunjuk, aturan sopan-santun, perilaku, atau adab di makam, antara lain dilarang duduk-duduk di atas makam. Terdapat hadis nabi yang mengatakan bahwa melompati atau menduduki makam adalah perbuatan yang tidak disukai atau *makruh*. Masyarakat penganut tradisi Jawa sangat percaya bahwa makam adalah salah satu tempat keramat yaitu tempat tinggal roh-roh nenek moyang, sehingga pada hari-hari tertentu harus dibersihkan serta dibacakan doa-doa. Anak-anak yang tiba-tiba sakit, sering dikait-kaitkan dengan para "penunggu" di makam-makam keramat. Makam adalah salah satu tempat yang harus dihormati selain masjid. Lihat A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam Berikut Ketersang dan Penjelasaannya*, Bangil: Pustaka Tamam, 2001, hlm. 261. Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989, hlm. 91-103.

<sup>2</sup> Sejak merdeka, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan tanah di perkotaan. Undang-undang pertanahan yang telah ada beserta peraturan di bawahnya sangat dipengaruhi oleh semangat pengaturan tanah untuk pertanian, bukan pengaturan tanah untuk tempat bermukim di perkotaan. Akibatnya pada setiap masa selalu muncul kasus-kasus pertanahan di perkotaan yang selalu berakhir dengan konflik antar individu atau kelompok yang memperebutkan tanah tersebut.

<sup>3</sup> Legalitas klaim atas tanah biasanya dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, pethok D, letter C, dan lain-lain. Namun legalitas yang paling kuat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah. Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005.



kenaikan jumlah penduduk kota tidak terkendali dan tidak diikuti kebijakan untuk membagi ruang kota secara adil dan legal.

Pembagian ruang kota secara adil mustahil dilakukan manakala kota hanya memiliki ruang yang amat terbatas, sementara ruang tersebut tidak ubahnya sebagai sebuah komoditi.<sup>4</sup> Dalam hukum komoditi maka siapa yang memiliki modal yang lebih besar dan lebih baik, apapun bentuknya, maka dialah yang akan berhasil menguasai ruang tersebut.

Jika hal tersebut yang terjadi maka pertanyaan kita adalah, di mana posisi rakyat miskin perkotaan memperoleh tempat? Rakyat miskin adalah kelompok yang memiliki modal yang amat minimal. Di kota-kota yang dikembangkan dengan mengedepankan ide-ide liberal dan kapitalis maka orang miskin adalah beban bagi sebuah kota. Tidak ada tempat yang layak bagi orang miskin untuk menempati ruang kota. Jika kenyataannya sampai saat ini mereka masih bisa mempertahankan diri untuk tinggal di kota, maka hal ini terjadi karena beberapa alasan.

*Pertama*, kota telah menjadi tempat yang nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal dibandingkan dengan kawasan lain, katakanlah desa. *Kedua*, tidak ada pilihan lain selain bertahan di kota dengan segala resiko yang harus terus-menerus dihadapi, yaitu bertahan atau melawan. Eksistensi rakyat miskin di kota merupakan bagian dari paradoks kota, pada satu sisi kota dianggap menghasilkan dan menjadi sumber dari peradaban tetapi pada saat yang bersamaan kota juga melahirkan masyarakat yang "kurang beradab". Kenyataan semacam ini bukanlah kenyataan sesaat tetapi lahir melalui proses sejarah yang amat panjang melalui persaingan antara yang "beradab" dan yang "tidak beradab". Dalam proses sejarah yang panjang itulah proses bertahan dan melawan dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup terus-menerus dilakukan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Dalam kasus Indonesia berbagai kebijakan yang memiliki muatan untuk membagi ruang secara fisik hanya bisa diberlakukan di daerah pedesaan karena konteks pembagian ruang tersebut lebih bernuansa agraris. Beberapa undang-undang yang mengatur pembagian ruang secara fisik (tanah) yang cukup monumental antara lain Agrarisch Wet 1870 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Bahkan aturan tentang pembagian tanah (landreform) yang digariskan dalam UUPA 1960 tidak pernah bisa dijalankan lagi secara wajar, walaupun di pedesaan, sejak undang-undang tersebut diundangkan. Artinya, terdapat problem yang mendasar berkaitan dengan proses pembagian ruang secara fisik, sekalipun di desa yang masih memiliki ruang yang relatif luas. Lihat Andi Achdian, *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Bogor: Kekal Press, 2009.

<sup>5</sup> Perlawanan rakyat miskin kota dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup muncul dalam bentuk yang amat beragam, terutama di negara-negara dunia ketiga di mana kemampuan negara untuk mengelola rakyat miskin di perkotaan masih amat terbatas serta tingginya angka urbanisasi di kota-kota besar. Kasus-kasus semacam ini banyak muncul di Amerika Latin, Asia Selatan dan Tenggara, serta di Afrika. Lihat Hernando de Soto, *Masih*

Kota-kota di Jawa mulai mengalami berbagai persoalan ketika mulai terjadi perubahan yang amat drastis dari kota tradisional menuju ke kota modern. Menurut Wertheim, kota-kota di Indonesia mengalami loncatan perubahan yang mendasar setelah tahun 1870. Liberalisasi ekonomi yang dimulai setelah disahkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, telah meningkatkan perdagangan dan industri, memperluas administrasi sipil, dan mengakibatkan kenaikan cepat jumlah penduduk perkotaan di Jawa.<sup>6</sup> Sensus penduduk tahun 1920 mencatat bahwa 6,63 persen penduduk Jawa tinggal di kota, dan pada sensus penduduk tahun 1930 penduduk yang tinggal di kota melonjak menjadi 8,7 persen. Dari jumlah tersebut, 3,8 persen tinggal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa.<sup>7</sup>

Tingginya pertumbuhan penduduk kota sebelum Indonesia merdeka disebabkan karena tingginya arus migrasi dari desa ke kota. Penghitungan penduduk tahun 1940 mencatat bahwa lebih dari setengah penduduk kota Bandung, Batavia, dan Surabaya dilahirkan di luar batas kota tersebut, namun mayoritas dilahirkan di propinsi di mana kota tersebut terletak.<sup>8</sup> Melonjaknya kedatangan orang-orang Eropa ke kota-kota di Indonesia bisa jadi merupakan faktor penentu yang melahirkan modernisasi kota. Keputusan mereka untuk memilih tinggal di sebagian besar kota-kota di Indonesia telah melahirkan tuntutan adanya otonomi kota yang direalisasikan dengan dibentuknya pemerintahan kota yang otonom (*gemeente*).<sup>9</sup> Modernisasi kota-kota itulah yang pada akhirnya memancing proses migrasi yang lebih besar. Orang-orang dari desa berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari penghidupan baru yang lebih men-

ada Jalan Lain: Revolusi tersembunyi di Negara Dunia Ketiga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991, Petrick McAuslan, Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, Jakarta: Gramedia, 1986, terutama Bab IV.

<sup>6</sup> W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 138.

<sup>7</sup> Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Volkstelling 1930, Java en Madoera, Batavia Centrum: Landsdrukkerij, 1931. W. Brand dalam salah satu artikelnya menyodorkan data yang cukup luas sebagai perbandingan. Pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota mencapai 3,8 persen, dari jumlah tersebut penduduk yang tinggal di kota-kota di Jawa dan Madura mencapai 4,7 persen dan di kota-kota pulau-pulau lain hanya 2 persen. Prosentase tersebut meningkat tajam pada tahun 1961. Pada tahun tersebut penduduk Indonesia yang tinggal di kota mencapai 14,8 persen, khusus kota-kota di Jawa dan Madura dihuni oleh 15,6 persen dan di kota-kota pulau-pulau lain melonjak sampai 13,3 persen. W. Brand, "Some Statistical Data on Indonesia," dalam *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde*, Deel 125, 1969, hlm. 308.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 259; Graeme J. Hugo, "Population Movements in Indonesia during the Colonial Period," dalam J.J. Fox et al. (ed.), *Indonesia: Australian Perspectives*, Canberra: Research School of Pacific Studies, ANU, 1980, hlm. 95-136.

<sup>9</sup> F.W.M. Kerckman, *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1950*, Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930.



janjikan sekaligus menikmati kota yang telah melahirkan imajinasi-imajinasi baru bagi kaum pendatang.

Terdapat beberapa alasan mengapa setelah tahun 1870 kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia melonjak secara drastis. *Pertama*, politik kolonial yang sedikit demi sedikit meninggalkan *cultuurstelsel* menunjang perkembangan perkebunan milik pribadi dan menjadikan Indonesia sebagai koloni untuk pemukiman. *Kedua*, kelancaran transportasi antara Belanda dan Indonesia telah mempermudah kedatangan wanita-wanita Belanda, setelah dicabutnya larangan membawa wanita Eropa ke Indonesia sejak awal abad ke-19.<sup>10</sup>

Kedatangan wanita-wanita Eropa ke Indonesia mengakibatkan kondisi masyarakat di kota-kota besar tampak lebih homogen karena sejak saat itu bagian terbesarnya adalah wanita Eropa. Perkawinan campuran semakin hilang, dan pria-pria Eropa mempunyai kesempatan untuk mengukuhkan kembali ikatan perkawinan ideal dengan sesama orang Eropa.<sup>11</sup> Dengan perkawinan tersebut maka mereka membangun keluarga yang menghasilkan keturunan-keturunan di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sudah sejak sebelum perang jumlah penduduk di kota-kota besar di Indonesia sudah sangat tinggi. Namun perubahan yang amat drastis terjadi setelah Indonesia berhasil keluar dari peperangan pasca proklamasi kemerdekaan. Selama periode perang penduduk di beberapa kota besar di Indonesia dengan terpaksa harus keluar dari kota mereka ke daerah-daerah pengungsian.<sup>12</sup> Namun, setelah perang

<sup>10</sup> VOC pernah membuat larangan keras yang diperuntukkan bagi para pegawai-nya untuk tidak membawa serta wanita-wanita dari Eropa dengan alasan untuk menghemat pengeluaran untuk membiayai pengiriman perempuan dari Eropa. Dengan adanya larangan ini maka VOC memperbolehkan adanya pergundikan serta perkawinan sah dengan penduduk lokal. Larangan tersebut baru dicabut ketika VOC bubar. Jean Gelman Taylor, *Kehidupan Sosial di Batavia*, Jakarta: Masup Jakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>11</sup> Data statistik tahun 1905 menunjukkan bahwa pada tahun 1900 terdapat 23.000 wanita Eropa, suatu keadaan yang menunjukkan kontras yang mencolok dengan abad-abad sebelumnya. Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembedaan*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 80.

<sup>12</sup> Beberapa peristiwa yang menyebabkan penduduk di beberapa kota besar harus keluar dari kota mereka antara lain, pertama ketika kota Surabaya diserang oleh pasukan Sekutu selama bulan Oktober dan Nopember tahun 1945. Perang besar yang berkobar di kota ini telah menyebabkan ribuan penduduk harus menyelamatkan diri ke daerah yang lebih aman di luar kota. Bahkan pemerintahan kota dan propinsi yang berkedudukan di kota Surabaya juga harus mengungsi. Lihat Roeslan Abdulgani, *Api Revolusi di Surabaya*, (Surabaya: Ksatria, 1964), hlm. 43. Kementerian Penerangan, *Djawa Timur*, Djakarta: Kementerian Penerangan, 1952. Kedua, sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville tentara yang masih berada di luar wilayah Republik Indonesia harus keluar dari wilayah tersebut menuju ke kantong-kantong republik. Akibatnya, kota Jakarta dan Bandung ditinggalkan oleh sebagian besar tentara dari Divisi Siliwangi beserta keluarga-keluarga mereka dalam jumlah yang cukup besar (hijrah).

berakhir gerakan untuk memasuki kota berlangsung kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk kota yang keluar ketika terjadi pengungsian. Ketika kota-kota mulai aman dan aktivitas perekonomian mulai bergerak kembali, kota menjadi salah satu tujuan dari masyarakat pedesaan untuk mengadu dan mengubah nasib. Kondisi ini telah menyebabkan jumlah penduduk di kota besar terutama di Jawa mengalami lonjakan yang cukup tajam.<sup>13</sup>

Sejak zaman kolonial sampai awal kemerdekaan, baik pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintah Indonesia, tidak pernah mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk di perkotaan yang sangat cepat tersebut, baik yang bersifat preventif dengan cara membatasi jumlah kelahiran dan mengurangi arus migrasi maupun dengan cara menaikkan daya dukung kota. Padahal kenaikan jumlah penduduk tersebut berakibat cukup fatal pada kondisi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

Kenaikan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan daya dukung kota yang memadai, akan memicu timbulnya kemiskinan. H.F. Tillema seorang apoteker di Kota Semarang pada awal abad ke-20 amat tertegun ketika menyaksikan kota-kota di Indonesia ternyata dihuni oleh sebagian besar penduduk pribumi yang amat miskin. Kemiskinan mereka terlihat dengan jelas pada kondisi pemukiman-pemukiman pribumi di berbagai kota di Indonesia, terutama di Kota Surabaya dan Semarang.<sup>14</sup>

Beberapa kota besar di Indonesia harus menanggung beban yang lebih berat akibat kenaikan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus migrasi. Hal ini disebabkan karena pada periode kolonial sampai awal kemerdekaan ketika kota yang berkembang baru sedikit, arus migrasi hanya menuju ke sedikit kota besar sehingga terjadi penumpukan orang-orang miskin di kota-kota tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian demografis yang dilakukan di beberapa kota seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Makassar setelah perang mengungkapkan keadaan yang bahkan lebih buruk dibandingkan dengan

<sup>13</sup> W. Brand, "Some Statistical Data on Indonesia," dalam *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde*, Deel 125, 1969, hlm. 308.

<sup>14</sup> H.F. Tillema, *Kromblanda: Over 't Vraagstuk van "het Wonen" in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid, 's-Gravenhage: uden Masman, De Atlas dan Adi Poestaka, 1915-1923.

<sup>15</sup> Lihat Gavin Jones, "Demografi dalam Kemiskinan di Kota," dalam Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (peny.), *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 38-56.



kondisi di Jakarta (Batavia) pada tahun 1930-an.<sup>16</sup> Kondisi ini terjadi karena kota-kota di Indonesia sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menampung lonjakan penduduk dalam jumlah yang demikian tinggi. Pada awal abad ke-20, para perancang kota bahkan merancang dan mengangankan Kota Batavia hanya untuk sembilan ratus ribu jiwa.<sup>17</sup>

Kecilnya jumlah penduduk yang diharapkan tinggal di kota-kota Jawa terkait erat dengan keterbatasan jumlah lahan yang bisa diakses sebagai tempat tinggal yang layak. Akibatnya, ketika tekanan penduduk semakin tinggi maka problem utama yang timbul di kota-kota besar di Jawa adalah masalah pemukiman. Penduduk asli yang tidak mampu membangun pemukiman yang layak maupun para pendatang yang tidak bisa ditampung dalam rumah-rumah yang memadai akhirnya harus rela tinggal di pemukiman-pemukiman miskin (*low cost housing*) dengan bahan seadanya dan sebagian lagi bahkan harus rela hidup tanpa pemukiman sama sekali (*pavement dwellers*). Kondisi ini telah mengakibatkan tumbuhnya kantong-kantong kemiskinan di berbagai kota di Indonesia yang nyaris tidak bisa diatasi sampai saat ini.

Keberadaan pemukiman-pemukiman miskin di kota kemudian berkembang menjadi salah satu simpul dari problem perkotaan yang lebih luas yang tidak hanya mencakup permasalahan pemukiman itu sendiri tetapi juga mencakup banyak dimensi yang menurut Hernando de Soto bersifat informal.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Lihat misalnya studi dari The Siauw Giap, "Urbanisatieproblemen in Indonesia", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 115, 1959, untuk melihat kondisi perkotaan di Jawa. Untuk penelitian terhadap kondisi demografi di Makassar setelah periode perang lihat R. Soemitro, "Zuigelingensterfte te Makassar," Vol. III, 1950. Untuk kondisi Jakarta setelah perang lihat H.J. Heeren, "The Urbanisation of Djakarta," dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. VIII (1955). Pada tahun 1930-an J.H. de Haas melakukan penelitian demografi di Jakarta (Batavia). Ia menemukan kondisi yang amat buruk bagi penduduk pribumi di kota tersebut, dan menemukan korelasi positif antara kondisi pemukiman dengan kondisi kesehatan para penghuninya. Penduduk pribumi yang rata-rata miskin dan tinggal di pemukiman-pemukiman miskin pula memiliki resiko kematian paling tinggi diantara penduduk Eropa, Cina, dan pribumi. Lihat J.H. de Haas, "Sterfte naar leeftijds groepen in Batavia in het bijzonder op den kinderleeftijd," dalam *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, Vol. VI, 1939.

<sup>17</sup> Adolf Heuken dan Grace Pamungkas, *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2001. Pada kenyataannya apa yang dianggarkan oleh perancang kota tersebut tidak pernah terwujud. Kota Batavia, yang kemudian berubah nama menjadi Jakarta, pada perkembangannya menjadi kota yang mendapat tekanan jumlah penduduk paling kuat. Pada tahun 1954 kota ini telah berpenduduk 1.800.000 jiwa, dan pada tahun 1980 penduduk kota Jakarta telah melonjak menjadi 6,5 juta jiwa. Lihat Susan Abeyasekera, *Jakarta: A History*, Singapore: Oxford University Press, 1987, hlm. 245.

<sup>18</sup> Menurut de Soto dimensi perkotaan yang bersifat informal antara lain perumahan informal, perdagangan (ekonomi) informal, dan angkutan informal. Hernando de Soto, *Masih ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991, bab 2 sampai 4.

Hal itu terjadi karena pemukiman miskin di perkotaan secara umum akan menciptakan persebaran kemiskinan dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam seperti sistem ekonomi perkotaan yang bersifat informal berskala kecil dalam bentuk pedagang asongan, pemulung, tukang rombeng, pedagang kaki lima, tukang sayur keliling, tukang minyak, tukang reparasi sepeda, dan sebagainya.

Pemukiman miskin juga menghasilkan sistem transportasi yang bersifat informal seperti tukang becak, tukang ojek, taksi gelap, dan sebagainya. Keberadaan sektor informal di kalangan masyarakat miskin perkotaan disebabkan karena rendahnya ketrampilan yang dimiliki oleh para pendatang serta jumlah mereka yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.<sup>19</sup>

Munculnya berbagai dimensi yang bersifat informal di perkotaan mengindikasikan bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk menerima para pendatang dalam skala besar karena ruang kota memang terbatas. Terbatasnya ruang kota membawa konsekuensi bahwa penggunaan ruang yang berlangsung secara terus-menerus akan melibatkan ketegangan di antara sejumlah kelompok kepentingan karena tingginya permintaan akan ruang baik oleh perorangan maupun oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu konflik yang menyangkut penggunaan suatu lokasi tertentu dapat timbul dengan mudah.

Persaingan untuk mendapatkan ruang di sini dianggap sebagai suatu perlombaan dan hadiahnya adalah ruang tersebut. Tidak semua pemain atau tim dalam perlombaan ini sama pentingnya, kelompok-kelompok yang paling strategis adalah yang paling berpengaruh, sedangkan sebagian besar anggota masyarakat yang lainnya harus menyesuaikan diri dengan keadaan supaya mereka dapat menemukan ruang (*niche*) untuk mereka.<sup>20</sup>

Buku yang ditulis kawan-kawan LPM EKSPRESI Universitas Negeri Yogyakarta merupakan gambaran dari persaingan atau perlombaan untuk memperebutkan ruang kota, sebagaimana diungkapkan oleh Colombijn tersebut. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, siapakah yang disebut sebagai kelompok strategis tersebut sehingga paling berpengaruh untuk mengubah ruang kota?

Kelompok strategis tersebut tidak lain dan tidak bukan ada-

<sup>19</sup> Lea Jellinek, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, Jakarta: LP3ES, 1994, terutama pada bab 3.

<sup>20</sup> Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 3



lah orang-orang yang memiliki modal besar. Merekalah sejati-pememenang dari pertarungan untuk memperebutkan ruang di perkotaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Max Weber, yang mengatakan bahwa kota adalah tempat pasar (*market place*), sebuah pemukiman pasar (*market settlement*).<sup>21</sup> Jika kota diidentikkan dengan tempat pasar, maka orang-orang berduit sajalah yang bisa mendapatkan yang terbaik di kota.

Buku yang merupakan hasil semi-investigasi ini secara jelas fragmentaris yang merupakan gambaran riil dari persaingan antara orang-orang yang bermodal dengan orang-orang tidak bermodal. Hasilnya adalah sebuah matriks dengan oposisi *binner* sebagai berikut:

Kategori Ruang	Basis Sosial-Ekonomi	
	Orang Kaya	Orang Miskin
Ruang Berdagang	Mal, Pertokoan	Kaki Lima
Ruang Bermukim	Perumahan, Real Estate	Kampung, Tepi, Sungai, Makam
Ruang Publik	Mal, Teater, Dunia Maya	Tepi Rel Kereta Api

Selama ini kota selalu digambarkan sebagai wilayah dengan heterogenitas para penghuninya, yang dilawankan dengan desa yang aspek-aspek homogenitasnya lebih menonjol. Heterogenitas para penghuni kota amat beragam dan saling bersilangan, mulai dari yang berbasis etnis (Jawa, Sunda, Batak, Minang, Madura, dan lain-lain), profesi (menejer, guru, dosen, tukang sapu, pengemis, tentara, polisi, dan lain-lain), kedudukan (wali-kota, camat, lurah, ketua RT, dan lain-lain), status sosial (orang kaya, orang miskin, golongan bangsawan, golongan orang kecil, dan lain-lain), dan sebagainya.

Namun demikian, heterogenitas yang tercipta secara sosial dan ekonomi tersebut tidak serta-merta tercermin dalam pembagian ruang kota, karena yang terjadi sesungguhnya adalah penciptaan homogenitas di dalam ruang-ruang yang mandiri

<sup>21</sup> Max Weber, *The City*, New York: The Free Press, 1966, hlm. 66

dan saling menyendiri. Jarang sekali terjadi pembauran yang sejajar di dalam ruang kota.

Matriks di atas merupakan gambaran dari homogenitas berdasarkan pembagian ruang kota yang berbasis pada status sosial dan ekonomi para penduduknya. Jika suatu ketika saat jalan-jalan ke mal, maka kita tidak akan melihat pedagang bermodal kecil menggelar dagangannya di tempat tersebut. Mal-mal dikuasai oleh pedagang besar dalam skala perusahaan menengah ke atas, seperti Matahari, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain. Sedangkan para pedagang dengan modal yang amat kecil hanya menempati tepi-tepi jalan yang berstatus ilegal, alias menjadi pedagang kaki lima. Karena tempatnya yang berstatus ilegal, maka para pedagang bermodal sangat kecil tersebut tidak jarang harus dikejar-kejar petugas ketertiban kota (Polisi Pamong Praja).

Jarang sekali mal di Indonesia yang membaurkan toko-toko berskala besar dengan para pedagang berskala kaki lima dalam satu tempat. Kalaupun ada pedagang kaki lima yang berjualan di mal, maka tempatnya bukan di dalam mal, tetapi di tepi-tepi jalan di dekat mal. Jika dilihat dari status sosial-ekonomi para pengunjungnya, tidak semua orang bisa berbelanja di mal. Orang-orang miskin jarang sekali bisa membelanjakan uangnya di mal. Jangankan berbelanja di mal, untuk makan sehari-hari saja sudah kesusahan. Maka antara pengunjung mal dengan pengunjung pedagang kaki lima sudah berbeda secara sosial-ekonomi.

Ruang bermukim di kota juga dibedakan berdasarkan status sosial dan ekonomi para penghuninya. *Real estate* dan kompleks perumahan besar dihuni oleh orang-orang berduit. Kota sejak zaman kolonial, pemukiman di Kota Yogyakarta sudah dibedakan berdasarkan status sosial dan ekonomi penghuninya. Kota Baru merupakan pemukiman elite peninggalan zaman kolonial. Saat ini pembagian pemukiman semacam itu terus berlanjut, yang meneguhkan adanya pembagian ruang bermukim berdasarkan besar-kecilnya modal yang dimiliki oleh para penghuni.

Di sepanjang Jalan Kaliurang sampai ke kawasan Wisata Kaliurang, kanan dan kirinya dipenuhi oleh pemukiman elite yang dimiliki oleh orang-orang berduit. Pemukiman semacam itu biasanya ditandai dengan kavling dan bangunan yang besar, dan kebanyakan bertingkat, jalan lingkungan yang lebar, serta terdapat gardu satuan pengamanan (satpam) di pintu masuk perumahan. Sementara, para kelas menengah ke bawah harus rela



tinggal di lingkungan perumahan kecil, yang ditandai dengan jalannya yang sempit, agak kumuh, kavling yang kecil, dan tidak memiliki penjagaan khusus.

Orang-orang yang tidak beruntung, karena tidak memiliki modal, harus rela tinggal di tepi-tepi sungai. Munculnya pemukiman di sepanjang bantaran Kali Code merupakan kisah terpinggirkannya kaum miskin di Kota Yogyakarta. Para pembuka pemukiman tersebut merupakan para gelandangan dan orang-orang miskin di Kota Yogyakarta.<sup>22</sup> Sebagian lagi harus rela tinggal di tempat yang sangat tidak layak untuk orang-orang yang masih hidup, yaitu tinggal di atas makam. Kisah kampung Badran, di Kota Yogyakarta bagian barat adalah kisah tergusurnya Makam Tionghoa (Bong Cina) oleh para pengembara dan pendatang.<sup>23</sup>

Gambar di atas telah meneguhkan sebuah realitas, bahwa walaupun kota merupakan gambaran dari heterogenitas, namun heterogenitas semu. Secara umum dalam keseharian penduduk kota tetap terkotak-kotak dalam basis sosial ekonomi mereka, yang tercermin dalam pembagian ruang-ruang kota. Mereka hidup sendiri-sendiri, tidak saling kenal, dan tidak akrab.

Hubungan sosial mereka didasarkan atas hubungan kerja yang kaku. Ruang-ruang kantor juga disekat, dibagi-bagi, untuk ditempati para karyawan berdasarkan status mereka. Para bos biasanya menempati ruangan yang lebih nyaman, berpendingin otomatis, harum, dan paling luas. Sementara para bawahan menempati ruangan yang bersifat massal, ditempati banyak karyawan, tidak berpendingin otomatis, dengan bau campur-aduk. Kota adalah tempat yang ramai, tetapi tidak jarang para penghuninya dihindangi rasa kesendirian atau anomie.

Anomie adalah disorganisasi nilai-nilai personal dan sosial selama saat-saat penuh ketegangan-ketegangan atau tekanan-tekanan katastrofik.<sup>24</sup> Kasus bunuh diri di mal yang menjadi tren akhir-akhir ini merupakan bukti kuat bahwa banyak masyarakat yang tinggal di kota besar mengalami anomie. Bunuh diri di mal adalah sesuatu yang aneh. Mal yang sangat ramai dengan lalu-lalang manusia dan merupakan tempat masyara-

<sup>22</sup> Mengenai kisah asal mula kehidupan di pinggir sungai di Kota Yogyakarta, lihat Hermawan Trinugraha, "Kali, Ruang Kota, Siasat," dalam *Kampung: Kampung Menulis Kota*, Yayasan Pondok Rakyat, 2005, hlm. 67-81

<sup>23</sup> Lihat Kusen Alipah Hadi, "Upaya Menghadirkan "Citra Lain" dari Ledak Badran," dalam *Kampung: Kampung Menulis Kota*, Yayasan Pondok Rakyat, 2004, hlm. 39-55

<sup>24</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2009, hlm. 30

kat kota mencari hiburan justru dijadikan tempat untuk bunuh diri. Padahal pada zaman dahulu kala, bunuh diri biasanya dilakukan di tempat sepi dan jarang diketahui oleh masyarakat umum. Inilah gambaran dari paradoks kota. Kota yang hiruk-pikuk dengan berbagai aktivitas dan heterogenitas para penghuninya sering kali menjebak warga kota ke dalam kesepian.

Buku ini merupakan studi awal yang mencoba menelusuri realitas kota besar kontemporer. Melalui sebuah sejarah yang panjang, ruang-ruang kota semakin terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil, yang masing-masing bagian telah ada otoritas yang mengontrolnya. Buku ini bisa menjadi dasar untuk meneliti lebih lanjut realitas kota-kota di Indonesia yang mengalami percepatan perubahan. Dengan membagi tema studi menjadi tema-tema yang lebih sempit, maka realitas yang sesungguhnya dari ruang kota akan semakin terlihat jelas.●

## Daftar Pustaka

- Abdulgani, Roeslan. (1964). *Api Revolusi di Surabaya*. Surabaya: Ksatria.
- Abeyasekere, Susan. (1987). *Jakarta: A History*. Singapore: Oxford University Press.
- Achdian, Andi. (2009). *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press.
- Brand, W. (1969). "Some Statistical Data on Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 125, 1969.
- Chaplin, J.P. (2009). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Colombijn, Freek. (2006). *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. (1931). *Volkstelling 1930, Java en Madoera*. Batavia Centrum: Landsdrukkerij.
- Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giap, The Siau. (1959). "Urbanisatieproblemen in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 115, 1959.
- Haas, J.H. de. (1939). "Sterfte naar leeftijdsgroepen in Batavia in het bijzonder op den konderleeftijd." *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederland-sch-Indie*, Vol. VI, 1939.
- Hadi, Kusen Alipah. (2004). "Upaya Menghadirkan "Citra Lain" dari Ledok Badran." *Kampung: Kampung Menulis Kota*, Yayasan Pondok Rakyat.
- Hassan, A. (2001). *Tarjamah Bulughul Maraam Berikut Keterangan dan Pen-jelasannya*. Bangil: Pustaka Tamam.
- Heeren, H.J. (1955). "The Urbanisation of Djakarta." *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. VIII, 1955.
- Heuken, Adolf dan Grace Pamungkas. (2001). *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.



- Hugo, Graeme J. "Population Movements in Indonesia during the Colonial Period." J.J. Fox et al. (ed.). (1980). *Indonesia: Australian Perspectives*. Canberra: Research School of Pasific Studies, ANU.
- Jellinek, Lea. (1994). *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Jones, Gavin "Demografi dalam Kemiskinan di Kota." Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (peny.) (1986). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementrian Penerangan. (1952). *Djawa Timur*. Djakarta: Kementrian Penerangan.
- Kerchman, F.W.M. (1930). *25 Jaren Decentralitatie in Nederlandsch-Indie 1905-1950*. Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen.
- Lombard, Denys. (2000). *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia.
- McAuslan, Petrick. (1986). *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*. Jakarta: Gramedia.
- Sarjita. (2005). *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Soto, Hernando de. (1991). *Masih ada Jalan Lain: Revolusi tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Taylor, Jean Gelman. (2009). *Kehidupan Sosial di Batavia*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Tillema, H.F. (1915-1923). *Kromoblanda: Over 't Vraagstuk van "het Wonen" in Kromo's Grote Land*, 6 Jilid. s-Gravenhage: uden Masman, De Atlas dan Adi Poestaka.
- Trinugraha, Hermawan. (2005). "Kali, Ruang Kota, Siasat," *Kampung: Kampung Menulis Kota*, Yayasan Pondok Rakyat.
- Weber, Max. (1966). *The City*. New York: The Free Press.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

# RUANG KOTA

Kota kian lama memerankan tokoh antagonis dalam teater sosial. Membayangkan kota tak seindah dulu saat Anda masih mendendangkan lagu Naik Delman. Kota, tiba-tiba sering membuat jenuh, namun tetap dapat menyodorkan penasaran. Ragam generasi manusia telah turut mendandani rupa kota. Banyak warga dibuat tersesat oleh kotanya sendiri. Terlupa dengan identitas dan keperluannya

Membaca ruang-ruang warga di kota, ibarat berkenalan dengan diri sendiri. Membuka jalinan kata lembar demi lembar dalam buku ini merupakan ikhtiar lanjutan memaknai kembali tampang kota yang terbelah oleh sekat-sekat ruang. Ruang-ruang yang sekarang cenderung mengekang warga untuk menikmati kotanya secara bebas.

Sejilid buku yang disulam oleh sekawanan pengamat muda ini menawarkan sketsa pembacaan ruang kota kekinian. Pemaknaan yang tidak beranjak dari asumsi tapi melalui perasaan yang diakibatkan oleh pertautan setiap saat antara manusia dengan kotanya. Kehendak warga untuk turut berpartisipasi aktif, terwakilkan dengan peliputan lapangan.

Rasakan perlahan ajakan untuk singgah di ruang-ruang kota tatkala Anda menggenggam buku ini. Fenomena-fenomena kota bisa Anda dapatkan tanpa perlu menjadi sok kota. Silakan menyusuri "Ruang Kota".

Sekian puluh tahun yang lalu, sebagian besar masyarakat kita bermimpi untuk mengembangkan ruang dan lingkungannya seperti kota. Kota dan seluruh isinya menjadi ukuran budaya modern. Buku kumpulan tulisan anak-anak muda ini mencoba mengkritisi kota sebagaimana mereka alami di berbagai tempat di Indonesia seperti Yogyakarta dan Surabaya. Seluruh tulisan ini sangat berharga karena ditulis oleh anak-anak muda yang tidak tunduk menerima kota begitu saja melainkan justru mau memaknainya secara kritis. Mereka tidak segan-segan membahas hal-hal sederhana seperti nama jalan, pedagang kaki lima, sungai, sampai dengan hal serius semisal masalah relokasi dan ruang publik.

**(St. Sunardi, Dosen Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanatha Dharma)**

Ruang di tangan kawan-kawan dalam buku ini membuat saya merasa lebih kaya dari sekadar uang sekaligus leluasa dari sebatas tempat. Dari persoalan sederhana, misalnya diberi tempat berteduh di kala hujan, tapi dengan analisa yang diperkuat, seolah pembaca berenang dalam pengetahuan yang dalam. Kumpulan tulisan dalam satu buku seperti kita baca ini memperkaya perspektif. Jika ingin kaya "berenang" dalam rimba pengetahuan, buku kumpulan tulisan ini layak dimiliki dan dibaca.

**(Ahmad Taufik, Jurnalis Majalah TEMPO)**



**EKSPRESI** *Buku*

Gedung Student Center Lt.2

Karangmalang Yogyakarta 55281

www.ekspresionline.com, email: lpm\_ekspresi@yahoo.com

